



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 17 /ORG/2016
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 19);

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2016 Nomor 7);

Memperhatikan : Nota Dinas Nomor : 060/ 328 /ORG, tanggal 31Desember 2015, hal Permohonan Persetujuan penetapan SK Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait.
- KETIGA** : Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu wajib:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja (LKj);
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2016.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2016

BUPATI TANAH BUMBU,



MARDANI H. MAMING

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu

Nomor : 188.46/ 17 /ORG/2016

Tanggal : 04 Januari 2016

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN TANAH BUMBU

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN | SUMBER DATA/SKPD PENANGGUNGJAWAB |
|--|--|--|---|---|--|
| Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat ekonomi maritim | Peningkatan Skala Ekonomi Daerah | Terwujudnya Ekonomi Maritim | Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga konstan) | Adanya peningkatan dari masing komponen pembentuk Pertumbuhan Ekonomi baik berdasarkan peningkatan skala usaha maupun peningkatan value/nilai dari produk yang dihasilkan yang diukur berdasar produksi, penerimaan dan pengeluaran masyarakat. | BPS/BAPPEDA |
| | | | PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (atas dasar harga berlaku) | (1) Peningkatan skala usaha/peningkatann nilai produk/jasa transportasi. (2) Komponen Pembentuk PDRB Transportasi; a). Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi, b). Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi, c). Pengembangan moda Transportasi. | BPS / DISHUB / DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN / BAPPEDA |
| | | | PDRB Sub Sektor Perikanan (atas dasar harga berlaku) | (1) Peningkatan skala usaha/peningkatann nilai produk sub sektor perikanan (2) Komponen Pembentuk PDRB sub Sektor Perikanan; a). Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan, b). Peningkatan Produksi Perikanan, c). Peningkatan Pengelolaan Pasca panen | BPS / DINAS PERIKANAN / BAPPEDA |
| Mewujudkan pembangunan industri kepariwisataan yang selaras dengan kehidupan beragama, sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur | Tanah Bumbu sebagai daerah tujuan wisata di Kalimantan Selatan | Berkembangnya Industri pariwisata daerah | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan domestik/mancanegara setiap tahun | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN | SUMBER DATA/SKPD PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|--|--|--|---|
| Mewujudkan Ekonomi Daerah berbasis ekonomi kerakyatan | Peningkatan Skala Ekonomi berbasis kerakyatan | Meningkatnya sektor industri dan Perdagangan | PDRB sektor industri (atas dasar harga berlaku) | (1) Peningkatan skala usaha/peningkatann nilai produk sektor industri (2) Komponen Pembentuk PDRB Sektor Industri; a). Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri, b). Peningkatan Kualitas UMKM, c). Peningkatan Pemasaran Produk UMKM | BPS / DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN / BAPPEDA |
| | | | PDRB Sektor Perdagangan (atas dasar harga berlaku) | (1) Peningkatan skala usaha/peningkatann nilai produk sektor perdagangan (2) Komponen Pembentuk PDRB Sektor perdagangan; a). Peningkatan Sarana dan Prasarana perdagangan, b). Peningkatan kualitas UMKM, c). Pengembangan brand Produk UMKM | BPS / DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN / BAPPEDA |
| | | | PDRB Perkapita | Peningkatan skala usaha/ peningan nilai seluruh sektor ekonomi dibandingkan dengan jumlah penduduk | BPS / BAPPEDA / SEMUA SKPD |
| Mengembangkan Agribisnis berbasis potensi wilayah (meningkatkan nilai tambah) | Peningkatan Produktivitas Pertanian | Meningkatnya sektor pertanian | PDRB sektor pertanian (atas dasar harga berlaku) | (1) Peningkatan skala usaha/peningkatann nilai produk sektor pertanian (2) Komponen Pembentuk PDRB Sektor pertanian; a). Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian, b). Peningkatan kualitas produksi, c). Peningkatan jaringan pemasaran produk pertanian, d). Penguatan Manajemen pertanian, dan e) Pengembangan produk unggulan daerah/kecamatan dan desa | BPS / DINAS PERTANIAN / BAPPEDA |
| | | | Nilai Tukar Petani (NTP) | Peningkatan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersumber dari hasil pertanian yang dilakukan | BPS / DINAS PERTANIAN / BAPPEDA |
| | | Meningkatkan Ketahanan Pangan | Ketersediaan Bahan Pangan Utama | Kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan utama masyarakat berdasarkan kemampuan produksi pangan yang dihasilkan oleh daerah secara rata-rata per harinya | BPS / DINAS KETAHANAN PANGAN |

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN | SUMBER DATA/SKPD PENANGGUNGJAWAB |
|---|--|---|---|---|---|
| Mewujudkan lingkungan yang berkualitas | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Suatu kondisi lingkungan yang dapat dikendalikan kerusakannya baik tanah, air dan udara hingga tidak berakibat pada penurunan gangguan pada manusia | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Tingkat kekritisan lahan | Suatu kondisi lahan yang rusak dan tidak mampu ditumbuhi pepohonan spesies setempat | DINAS PERTANIAN |
| | | Berkurangnya potensi kerawanan bencana alam | Luas Wilayah Rawan Kebanjiran | Suatu kondisi suatu daerah memiliki kerentanan terhadap bahaya banjir, baik karena hujan, air pasang maupun karena runtuhan yang tinggi dari DAS | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | Indeks Resiko Bencana Banjir | Suatu upaya yang dilakukan oleh daerah bagi masyarakatnya memiliki resiko akibat banjir, baik karena hujan, air pasang maupun karena meluapnya air sungai | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | Indeks Resiko Bencana Gelombang Tinggi dan Abrasi | Suatu upaya yang dilakukan oleh daerah yang masyarakatnya memiliki resiko akibat gelombang laut yang tinggi dan adanya abrasi | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | Indeks Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan | Suatu upaya yang dilakukan oleh daerah yang masyarakatnya memiliki resiko akibat bencana kebakaran hutan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Terwujudnya Lahan RTH | RTH publik yang terbangun/tersedia | Suatu kondisi lingkungan yang nyaman dan teduh sebagai ruang terbuka yang rekreatif, untuk bermain dan kegiatan lainnya yang secara bebas tanpa mengedepankan dominasi kegiatan tertentu oleh pemerintah/masyarakat | DINAS PU DAN PENATAAN RUANG / DINAS PERKIMTAN |
| Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air | Meningkatkan pemanfaatan air baku | Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Sumber Energi dan Pertanian | Luas lahan pertanian yang beririgasi | lahan pertanian masyarakat yang sudah dialiri melalui irigasi teknis | DINAS PU DAN PENATAAN RUANG |
| | | Meningkatnya Akses dan Ketersediaan Air Bersih | Persentase Rumah Tangga berakses air bersih | $\frac{\text{jumlah RT yang berakses air bersih}}{\text{jumlah total RT Kabupaten}} \times 100\%$ | DINAS PU DAN PENATAAN RUANG |
| Meningkatkan permukiman lingkungan berbasis | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman | Tertatanya kawasan permukiman berbasis lingkungan | cakupan lingkungan sehat yang aman dan didukung prasarana | Suatu kondisi kawasan permukiman yang sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan sehingga kawasan permukiman tersebut memiliki lingkungan yang sehat, aman dan prasarana yang memadai. | DINAS PERKIMTAN |

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN | SUMBER DATA/SKPD PENANGGUNGJAWAB |
|---|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Mewujudkan sistem pendidikan yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global | Meningkatnya kualitas pendidikan | Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Suatu kondisi seluruh anak usia sekolah mampu berpartisipasi dalam pendidikan sesuai jenjang usia dan jenjang sekolah | BPS / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / BAPPEDA |
| | | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | Suatu kondisi sekolah yang memiliki kemampuan menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi institusi pendidikan yang sesuai standar pelayanan minimum pada jenis dan jenjang pendidikan. | BPS / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / BAPPEDA |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | Suatu kondisi masyarakat yang dengan ketersediaan sarana/prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan program-program pembangunan dibidang kesehatan yang memberikan efek membaiknya pola hidup masyarakat. | BPS / DINAS KESEHATAN / BAPPEDA |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | Meningkatnya keberdayaan masyarakat | Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indek Pemberdayaan Gender (IPG) | Suatu kondisi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, cacat maupun tidak cacat memperoleh hak yang sama dalam berpartisipasi dan memperoleh nilai yang sama secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan perlindungan keamanan secara lahir batin. | DINAS KB P3 A |
| | | | Kota Layak Anak | Suatu kondisi Permukiman/kota yang memiliki fasilitas tumbuh kembang anak sesuai standar dan daya jangkau masyarakat baik anak laki-laki maupun perempuan, cacat maupun tidak cacat memperoleh kesempatan kesempatan secara aman, nyaman dan bebas dari tekanan dan kekhawatiran/trauma | DINAS KB P3 A |
| | | Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | PMKS yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{jumlah total PMKS Kabupaten}} \times 100\%$ | DINAS SOSIAL |
| Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing | Meningkatnya kesempatan kerja | Terserapnya angkatan kerja | Tingkat pengangguran terbuka | $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ | DINAS NAKERTRANSKOP DAN USAHA MIKRO |
| Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan | Prestasi atlet dalam PORDA KALSEL | Meningkatnya presetasi pemuda dalam pembangunan | Jumlah Atlet daerah yang berprestasi pada tingkat nasional | Prestasi pembinaan olah raga pada semua cabang olah raga dan oleh segala umur bagi masyarakat dalam event lomba tingkat nasional | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya | Stabilitas daerah | Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat beragama | Konflik antar umat beragama | Suatu kondisi masyarakat yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban permasalahan yang mengatasnamakan agama. | KANTOR KESBANGPOL |

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN | SUMBER DATA/SKPD PENANGGUNGJAWAB |
|--|---|--|---|--|---|
| Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya kapasitas pelayanan publik | Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government | SKPD yang menerapkan e-Government | Suatu kondisi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang seluruh SKPD menerapkan keterbukaan, mengembangkan SOP, menerapkan SPM, berorientasi pada pelayanan dan aparaturnya memiliki integritas kolektif yang tinggi dalam melaksanakan tugas. $\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan e-Gov}}{\text{jumlah SKPD}} \times 100\%$ | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | LKj (Laporan Kinerja) | Suatu cerminan prestasi pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, evaluasi dan monitoring seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. | BAPPEDA / INSPEKTORAT DAERAH/BAGIAN ORGANISASI / SEMUA SKPD |
| | | Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK | Suatu kondisi pengelolaan keuangan dan asset daerah memiliki kinerja yang baik mulai dari pengendalian perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporannya. | INSPEKTORAT DAERAH / SEMUA SKPD |
| | | | Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) | $\frac{\text{Jumlah PAD tahun - n}}{\text{jumlah total APBD tahun - n}} \times 100\%$ | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Suatu kondisi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat yang semakin baik dari tahun ketahun. | SEMUA SKPD |
| | | Meningkatnya kinerja pemerintahan desa | Desa dengan laporan keuangan baik (berdasarkan hasil audit inspektorat dan/ata BPK) | $\frac{\text{Jumlah desa dengan hasil audit laporan keuangan baik}}{\text{jumlah total desa di Kabupaten}} \times 100\%$ | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING